

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program ataupun kegiatan guna memenuhi sasaran strategis. Anggaran pemerintah terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pusat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tiap daerah. Anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD adalah instrumen penting bagi pemerintah dalam menetapkan prioritas program pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi arah kebijakan fiskal yang terus ada di APBN maupun APBD tiap tahunnya. Infrastruktur erat kaitannya dengan pengeluaran belanja yang ada pada anggaran. Dalam anggaran, belanja memainkan peran yang penting dalam pencapaian tujuan nasional, terutama dalam meningkatkan dan memelihara kesejahteraan rakyat (Siswanto & Rahayu, 2010). Unsur dominan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah faktor konsumsi, sehingga belanja yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan tersebut, hal ini berarti penyerapan anggaran tetap memiliki pengaruh besar (Sinaga, 2016).

Setiap akhir tahun anggaran, hampir selalu terjadi diskusi yang menarik tentang penyerapan anggaran. Pola penyerapan anggaran yang rendah di semester pertama namun tinggi di semester kedua selalu terjadi. Kendati demikian, realisasi belanja tahun 2018 tertinggi dalam sejarah Indonesia (Rahayu, 2019). Penyerapan belanja untuk tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan yang lebih baik dari dua tahun anggaran sebelumnya. Kondisi penyerapan anggaran belanja di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1 (Realisasi Anggaran Belanja Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018).

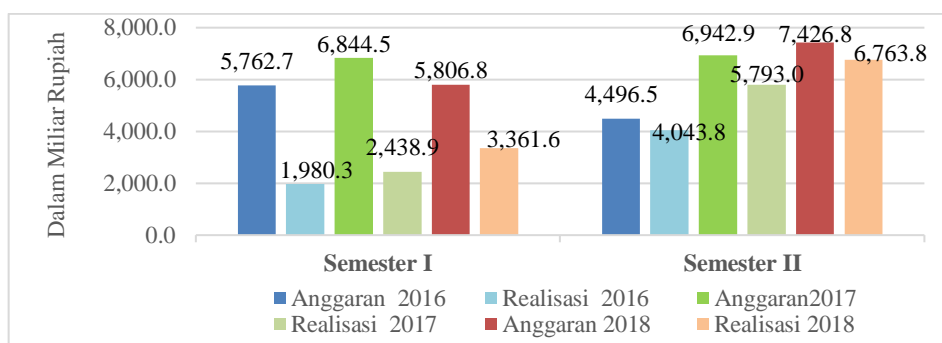
Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Indonesia
Tahun 2016 – 2018

Tahun	Semester	Triliun Rupiah	%	% Kumulatif
2016	I	865,4	41,5	41,5
	II	1860,3	47,8	89,3
2017	I	893,3	42,9	42,9
	II	2.001,6	50,9	93,8
2018	I	944,01	42,51	42,51
	II	2.202,4	56,66	99,17

Sumber: Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id).

Tabel 1.1 menunjukkan pada tahun 2016 hingga 2018 penyerapan belanja pada semester pertama selalu lebih rendah dibandingkan penyerapan belanja pada semester kedua. Pencairan anggaran belanja pada semester kedua selalu lebih besar daripada pencairan anggaran belanja semester pertama, namun hingga akhir tahun anggaran penyerapan belanja belum mencapai target maksimal 100%. Kondisi pola penyerapan di semester pertama dan kedua menunjukkan pola penyerapan belanja yang belum optimal.

Penyerapan belanja negara yang terus meningkat juga diikuti oleh penyerapan belanja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dilihat pada gambar 1.1.



Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sumatera Selatan (bi.go.id).

Gambar 1.1
Grafik Realisasi Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016 – 2018

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2016-2018 terjadi peningkatan realisasi belanja. Meskipun belum mencapai target optimal, realisasi belanja Provinsi Sumatera Selatan di akhir tahun mengalami peningkatan. Peningkatan penyerapan belanja ini tidak diiringi dengan penyerapan

belanja modal yang signifikan. Belanja pemerintah melalui belanja modal perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar karena dapat menstimulasi perekonomian. Belanja modal merupakan komponen belanja langsung, bermanfaat dalam anggaran pemerintah daerah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap yang secara langsung maupun tidak langsung (Oktaviani, 2018). Tabel 1.2 menunjukkan tingkat penyerapan jenis belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 hingga 2017.

Tabel 1.2
Penyerapan Jenis Belanja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2015-2017

Dalam milyar rupiah

Belanja	2015		2016		2017	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
Operasi	3.455,8	86,1	3.486,5	95,5	4.410,3	95,2
Modal	1.041,1	65,1	607,7	71,8	1.377,3	76,2
Tak Terduga	1,038	99,9	0,18	100	0,792	89,8

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BPK RI.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa belanja modal memiliki tingkat penyerapan terendah dibanding jenis belanja lain. Realisasi belanja modal belum mencapai angka 80% jika dibandingkan dengan belanja operasi dan belanja tak terduga. Nugroho dan Alfarisi (2017) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan penyerapan anggaran adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, dan koordinasi dengan instansi lain.

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan terkait penyerapan anggaran telah dilakukan. Dalam penelitian Herriyanto (2012) disebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah perencanaan anggaran. Pengoptimalan penyerapan anggaran memerlukan sebuah perencanaan yang baik dan terukur. Adanya anggapan jika semua anggaran yang diusulkan akan disetujui, membuat anggaran diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan

Hal lain yang mempengaruhi penyerapan belanja modal adalah *e-procurement* atau pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik. Taufik, Darwanis, dan Fahlevi (2016) menyatakan adanya pengaruh penerapan

e-procurement terhadap penyerapan belanja modal pada satuan kerja Kementerian/Lembaga yang berada pada lingkup pembayaran KPPN Banda Aceh. Selanjutnya, Nurhayati, Djuminah, dan As Sahara (2017) menyebutkan bahwa pemanfaatan *e-procurement* tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain perencanaan anggaran dan penerapan *e-procurement*, penyerapan belanja modal juga dipengaruhi oleh kompetensi aparatur pemerintah. Herriyanto (2012) menemukan bahwa kurang kompetennya panitia/pejabat pengadaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan belanja. Dilain pihak, Rerung, Karamoy, dan Pontoh (2017) menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Penerapan *E-Procurement*, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Penyerapan Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Penerapan *e-procurement* berpengaruh terhadap Penyerapan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Penyerapan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Perencanaan Anggaran, Penerapan *e-procurement*, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penyerapan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Penulis memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi penyerapan belanja modal dengan menggunakan faktor perencanaan anggaran, penerapan *e-procurement* dan kompetensi aparatur pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Selatan. Pengambilan data dilakukan selama bulan Mei hingga Juni 2019.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap penyerapan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap penyerapan belanja modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, penerapan *e-procurement* dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap penyerapan belanja modal pada Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai upaya mengoptimalkan penyerapan belanja modal.
2. Bagi akademisi dan peneliti, dapat menambah bahan referensi dan masukan untuk dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik berkenaan penyerapan belanja modal.